



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga penyusunan Renstra ini dapat terselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 – 2016 disusun berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022. Renstra ini disusun berpedoman pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan pada bidang Komunikasi, informatika, statistic dan persandian yang tertuang dalam visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2017 – 2022 yang akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan bidang Kominfo yang hendak dicapai pada periode 2017 – 2022 khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, serta merupakan dasar dan acuan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik: (1) menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja). (2) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan (3) evaluasi kinerja. Renstra ini juga menjadi acuan bagi SKPD kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat untuk penyusunan Rencana Strategis.

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan pada bidang komunikasi, informatika, persandian dan statisti di wilayah Provinsi Sulawesi Barat secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis, dan berkesinambungan.

Mamuju, 8 Januari 2018

Kepla Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi
Barat,

Drs. H. Muzakkir Kulasse, MM.
NIP. 19610101198803 1 027



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi, informatika, persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya	16
2.3 Kinerja Pelayanan	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	20
BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur.....	26
3.3 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informasi.....	28
3.4 Isu-Isu Strategis	29
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat	31
4.1 Visi dan Misi	31
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	32
4.3 Strategi dan Kebijakan	38
BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	41
BAB VI Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat	15
Gambar 2.2.1	Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai berdasarkan kepegawaian formal	16
Gambar 2.2.2	Grafik Perbandingan Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal	17
Gambar 2.2.3	Grafik Perbandingan Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Pangkat	17



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1	Daftar Aset Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat	18
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Inforatika, Persandian dan Stattistik Provinsi Sulawesi Barat	23
Tabel 3.2.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.....	20
Tabel 3.3.1	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Sasaran Renstra KL beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	28
Tabel 4.1	Taujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statisti Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2018 – 2022	34
Tabel 4.2	Strategi dan Kebijakan Pembangunan di Bidang Layanan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat	38
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandiam dan Statistik	42
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal.

Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur. Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi, yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan masyarakat.

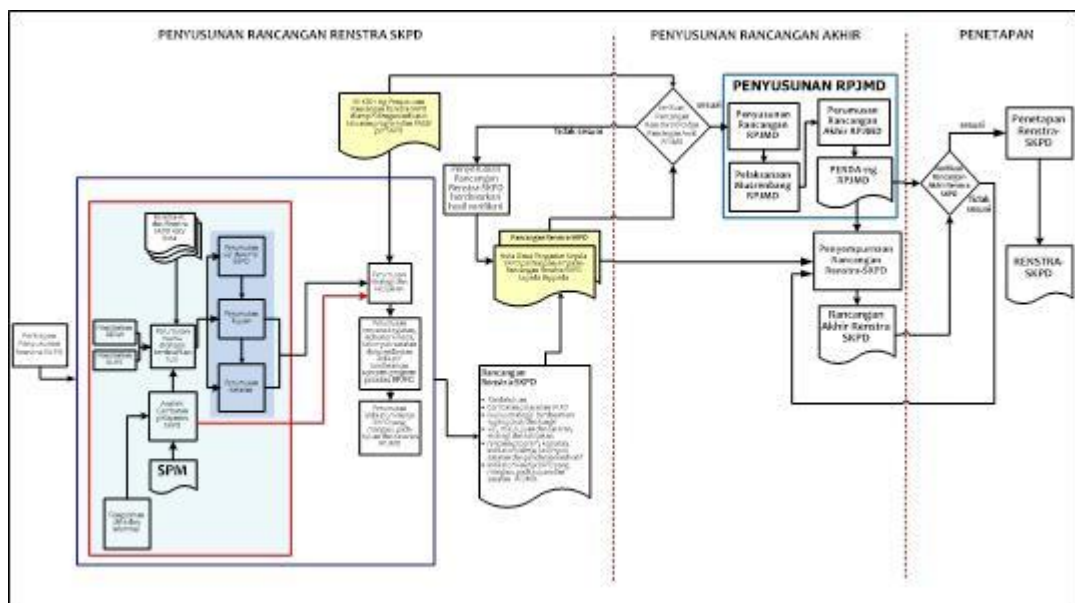
Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan tentu memerlukan informasi yang tepat, mudah dan cepat diakses, serta akurat. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut perlu dikembangkan sinergi antara manajemen pemerintahan dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang didukung keterhubungan jaringan informasi yang mencakup seluruh institusi pemerintah. Hal ini secara Teknis TIK mudah dilaksanakan, tetapi pada implementasinya faktor non teknis menjadi kendala.

Mengingat peran penting teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang bersih (Good Government), maka pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam kurung waktu lima tahun kedepan akan melakukan berbagai upaya dalam mengatasi

permasalahan kesenjangan dalam hal akses layanan informasi bagi masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat adalah dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai arah pelaksanaan program berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam kurung waktu 5 (lima) tahunan dan bersifat indikatif. Renstra ini akan menjadi acuan (*guidance*) dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin *accountable*. Sebagai dokumen perencanaan publik, penyusunan renstra dilakukan dengan pendekatan; Teknokratis, Partisipatif, Politis, dan *topdown-bottom-up*, melalui kegiatan workshop dan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan *stakeholder*. Harapannya dokumen Renstra ini mejadi langkah kongkrit sinkronisasi dan sinergi pencapaian tujuan pengembangan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022



Renstra ini disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017 – 2022 serta memperhatikan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Kabupaten/Kota sehingga mensinergikan pembangunan TIK, pengelolaan persandian dan penyediaan data statistik sektoral di Sulawesi Barat dengan pembangunan TIK, Pengelolaan persandian dan penyediaan data statistik nasional dan Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai informasi dan rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus bahan kebijakan teknis Dinas dengan tetap memiliki korelasi dengan agenda serta visi dan misi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD.

Penerapan Teknologi Informasi yang baik pada gilirannya akan mendukung proses penentuan arah dan kebijakan organisasi. Dukungan teknologi informasi bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi, dalam menjalankan berbagai fungsinya. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai salah satu unsur dinas berupaya untuk memfungsikan dirinya sebagai fasilitator, mediator serta koordinator dari fungsi-fungsi komunikasi dan informatika tersebut, termasuk dalam pelayanan pengadaan barang/jasa publik melalui UPTD LPSE, pengelolaan persandian, dan penyediaan data statistik sektoral.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
- 11) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 14) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;
- 15) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provimsi Sulawesi barat Nomro 51);
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 –2021.
- 18) Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 - 2022 dimaksudkan untuk menetapkan arah dan kebijakan pembangunan dibidang penyelenggaraan komunikasi dan informatika, pengelolaan persandian dan penyediaan data statistik sektoral sehingga lebih terarah, efektif, efisien, dan terpadu dalam kurung waktu lima tahun kedepan (2017 – 2022) untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat yang transparan dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah:

- 1) Sebagai acuan resmi bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan

- 2) Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun dokumen perencanaannya untuk meningkatkan sinergitas pembangunan daerah khususnya dalam bidang penyediaan layanan informasi, pengelolaan persandian dan penyediaan data sektoral daerah.
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan indikator evaluasi.
- 4) Sebagai acuan resmi untuk pengukuran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

- 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur
- 3.3 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT

- 4.1 Visi dan Misi
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI BARAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat diatur dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 menyatakan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan Urusan di Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

2) Membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang Kominfo meliputi Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi, Bidang Teknologi Informasi, Komunikasi dan Statistik, Bidang Pelayanan E-Government dan Bidang Persandian.

3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi :

menyusun rencana daerah di bidang Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan rencana daerah dan nasional;

perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Teknologi Komunikasi Informasi, Persandian dan Statistik;

pengoordinasian dan pembinaan UPTD.

Berikut rincian tugas dan fungsi sekretariat dan bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik:

9) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh unit organisasi dilingkungan dinas komunikasi dan informatika.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- koordinasi perumusan dan penyusunan rencana, program dan anggaran
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja
- pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan dan pengelolaan asset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara
- pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- koordinasi dan penyusunan produk hukum dilingkungan dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik;
- dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

10) Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi

Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik,

Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi.

14) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi menyelenggarakan fungsi:

penyusun program kerja Bidang Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi;

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi;

penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi;

penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan Informasi

untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan

- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup pemerintah daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi.

pelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan

2) Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Statistik

Bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Statistik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Teknologi

Informasi Komunikasi dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi

e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;

pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dasar Data Center, *Disaster Recovery Center* & TIK Pemerintah Daerah

Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.

4) Bidang Layanan E-Government

(1) Bidang Layanan E-Govermen mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah daerah provinsi dan masyarakat.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Layanan E-Government menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
 - b. pelaksanaan nama domain dan sub domain bagi lembaga pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan government chief information officer, pengembangan sumber daya tik pemerintah daerah provinsi dan masyarakat provinsi;
 - c. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) Bidang Persandian

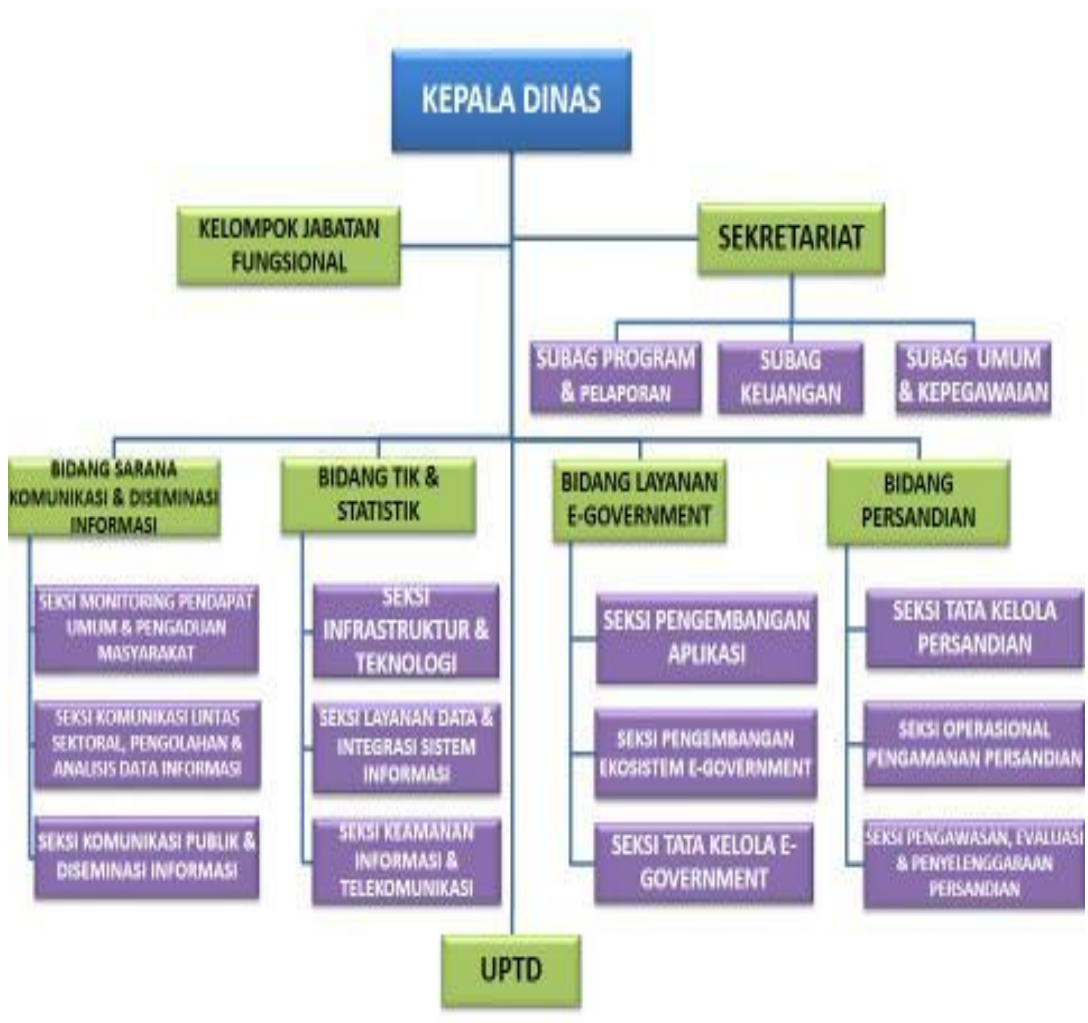
- (1) Bidang Persandian mempunyai tugas Penyelenggaraan operasional kegiatan Sandi dan Telekomunikasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Sandi dan Telekomunikasi I;
 - b. pengkajian bahan kebijakan umum Sandi dan Telekomunikasi;
 - c. pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi Sandi dan Telekomunikasi;
 - d. pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi Sandi dan Telekomunikasi;
 - e. pengkajian bahan, pemberian petunjuk teknis dan mengkoordinir pelayanan Operasional Sandi dan Telekomunikasi;
 - f. koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

- a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat



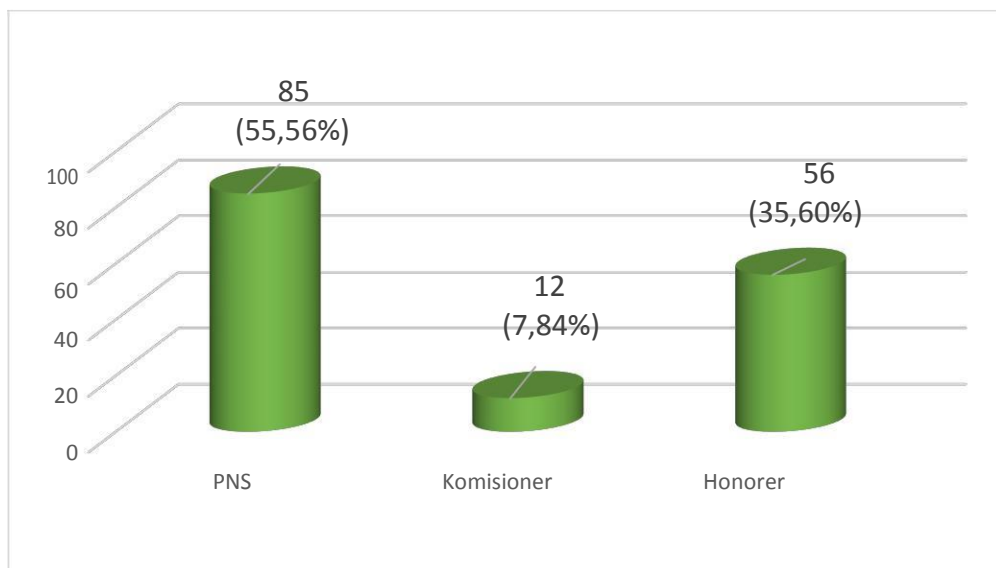
2.2 Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

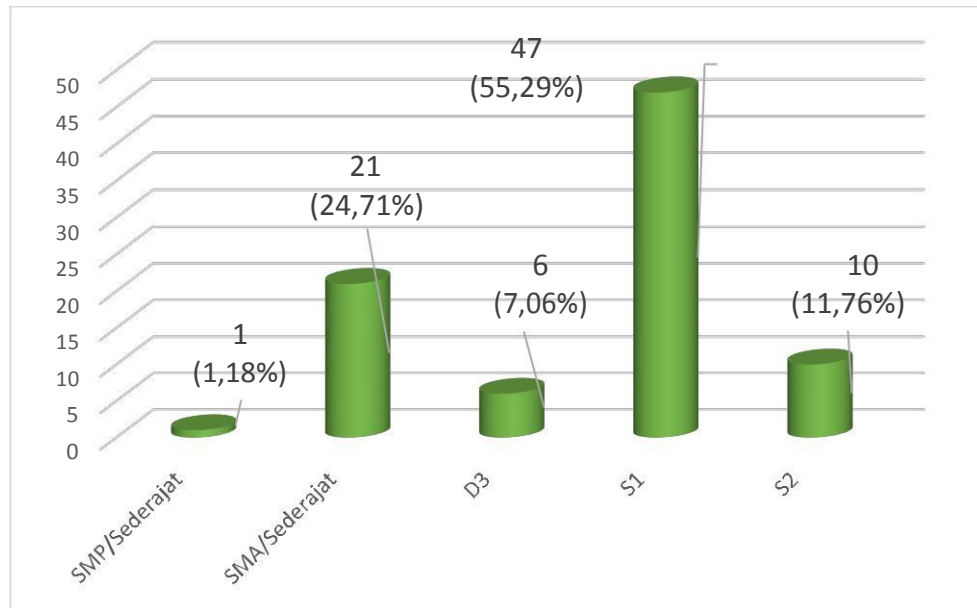
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh sebanyak 153 pegawai/karyawan, yang terdiri dari 85 orang PNS, Komisioner 12 orang dan tenaga honorer sebanyak 56 orang.

Gambar 2.2.1
Grafik Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Formal



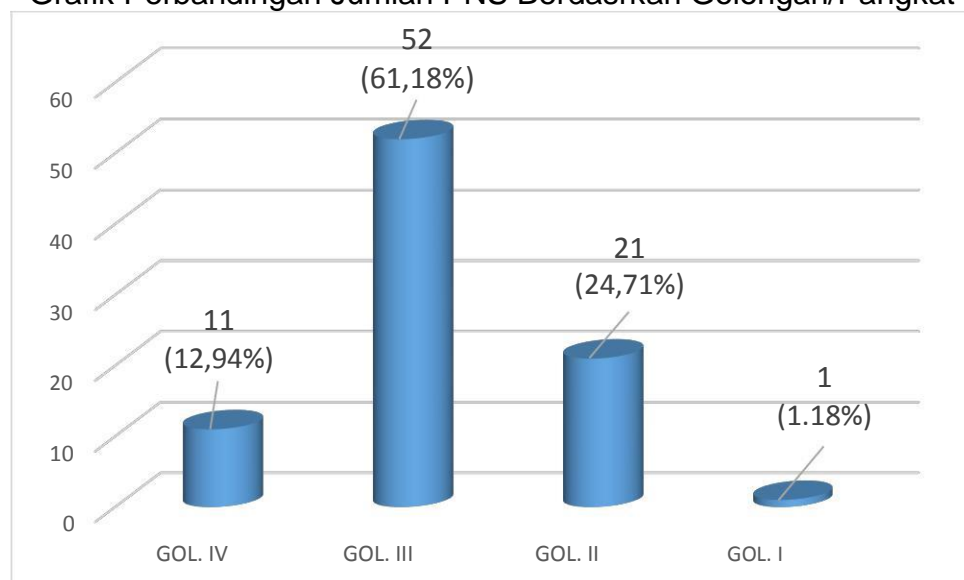
Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2017

Gambar 2.2.2
 Grafik Perbandingan Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal



Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2017

Gambar 2.2.3
 Grafik Perbandingan Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Pangkat



Sumber: Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2017

2.2.2 Sarana dan Prasarana Instansi

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai sangat berpengaruh terhadap kinerja/layanan yang

diberikan oleh suatu organisasi, demikian juga halnya dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki akan sangat berpengaruh terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik. Berikut data asset yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat:

Tabel 2.2.1
Daftar Asset Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat

No.	Uraian	Volume	Keterangan
1.	Mobil	3 Unit	Baik
2.	Motor	14 Unit	Baik
3.	Laptop	12 Unit	Baik
4.	Komputer / PC	16 Unit	Baik
5.	Filling Kabinet	14 Unit	Baik
6.	Lemari Kerja	10 Unit	Baik
7.	Kursi Kerja	67 buah	Baik
8.	Kursi Rapat	10 buah	Baik
9.	Kursi Tamu	1 Pasang	Baik
10.	Kursi Biasa	22 buah	Baik
11.	Meja Kerja	67 buah	Baik
12.	Printer	18 unit	Baik
13.	Server	6 unit	Baik
14.	Camera	3 unit	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan

Adanya dinamika perubahan yang kompleks, waktu yang bergulir demikian cepat karena lingkungan yang selalu berubah dalam hal ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial dan budaya mengharuskan setiap lembaga dan aparatur pemerintah, serta masyarakat mengikuti perubahan dinamika tersebut.

Agar tujuan dan sasaran kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat tercapai, diperlukan kapasitas/kemampuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat, oleh

karenanya harus selalu dilakukan tinjauan secara terus menerus terhadap kondisi kerangka kerja dan penyesuaian secara dinamis terhadap fungsi dan tujuan suatu organisasi. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome).

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat dituntut memiliki kapasitas/kemampuan dalam melayani tuntutan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat dalam hal pelayanan publik (public relation) melalui implementasi telematika sesuai dengan kebutuhan, dinamika dan kemajuan masyarakat, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dapat tercapai. Kapasitas/kemampuan sangat tergantung pada sarana dan prasarana yang dimiliki, antara lain peralatan telematika, baik yang digunakan untuk mendukung aktivitas maupun untuk pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi seperti jaringan LAN (*local area network*), WAN (*Wide area network*) dan pemanfaatan intranet dan internet.

Kedepan perlu dilakukan pengembangan secara bertahap dan terencana, khususnya pengembangan konten system aplikasi SKPD dalam satu *Network operating Center* (NOC) guna peningkatan pelayanan public. Jaringan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pejabat struktural, fungsional dan staf dalam lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat dan masyarakat untuk dapat mengakses data dan informasi dari data center Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat melalui media komputer secara intranet maupun internet di ruang masing-masing untuk mencari informasi maupun penyebaran informasi yang dimilikinya dan menjadikan teknologi informasi sebagai kebutuhan pokok dalam menunjang tugas aparatur disegala bidang.

Adapun harapan yang diinginkan kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan local government (Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat) sebagai pengelola dan koordinator jaringan telematika dan pusat data base daerah dimana semua lembaga/institusi baik pemerintah dan masyarakat dapat interkoneksi dalam satu *Network Area Center (NOC)*;
- 2) Menegembangkan sarana dan prasarana fasilitas publik bidang telematika yang dapat langsung dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, sehingga percepatan informasi dapat berjalan secara signifikan;
- 3) Peningkatan SDM dibidang TIK dengan target sasaran aparatur pemerintah dan masyarakat;
- 4) Pengembangan infrastruktur TIK;
- 5) Penyebaran informasi dan penyelenggaraan kemitraan dengan media massa dalam rangka peningkatan potensi daerah;
- 6) Pengembangan konten website Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang meliputi system aplikasi SKPD baik secara intranet maupun internet;
- 7) Pengembangan implementasi e-government dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.
- 8) Pengelolaan persediaan untuk keamanan informasi;
- 9) Menyiapkan data sektoral

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam lima tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK di Sulawesi Barat, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. Untuk mewujudkan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai pusat data center di Sulawesi Barat tentu saja perlu dorongan good will dari pimpinan dan stakeholder lainnya untuk dapat mengimplementasikan

rencana strategis disamping juga memberikan SDM yang mumpuni dapat mengaplikasikan TIK tersebut.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK, pengelolaan persandian dan penyediaan data sektoral yaitu :

2.4.1 Tantangan

- 1) Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik.
- 2) Kesenjangan informasi di masyarakat
- 3) Pesatnya perkembangan TIK
- 4) Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata
- 5) Terbatasnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap TIK
- 6) Belum adanya *Disaster Recovery Plan*;
- 7) Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif;
- 8) Belum bakunya pola arus data informasi antar instansi;
- 9) Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi;
- 10) Keterbatasan anggaran;
- 11) Inkonsistensi penempatan SDM dengan kompetensi yang dimiliki
- 12) Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government
- 13) pengelolaan website Pemerintah Provinsi secara terintegrasi
- 14) Pemahaman tupoksi oleh sebahagian staf masih kurang mengingat Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik yang baru terbentuk
- 15) Belum terbentuknya jabatan fungsional dibidang penelitian dan pengembangan yang sangat dibutuhkan
- 16) Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan Database, sehingga implementasi e-govermen belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat

- 17) Belum tersedianya peralatan kantor yang memadai
 - 18) Kurangnya ketersediaan sarana pendukung yang dimiliki
 - 19) Belum tersedianya SDM yang memadai dibidang pengemabangan infrastruktur TIK
-
- 1) Kepedulian pimpinan terhadap bidang komunikasi, informatika, pengelolaan persandian dan penyediaan data sektoral
 - 2) Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
 - 3) Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
 - 4) Kebutuhan pengembangan muatan e-Government
 - 5) Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
 - 6) Kebutuhan pengembangan TIK, pengamanan dan penyediaan data sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan
 - 7) Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang komunikasi dan informatika
 - 8) Adanya fasilitas bantuan perangkat server dari LKPP;
 - 9) Kebutuhan organisasi yang semakin meningkat;
 - 10) Komitmen semua unsur Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas
 - 11) Penyelenggaraan statistik sektoral
 - 12) Penerapan Fungsi GPR (Government Public Relations)
 - 13) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang baru terbentuk awal Januari tahun 2017 yang dibebani tanggung jawab menangani unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Sebelum terbentuknya Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik pelaksanaan urusan di bidang komunikasi dan informasi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan urusan pengelolaan persandian dikelola oleh Biro Humas dan Protokol, sedangkan penyediaan data statistik sektoral dilaksanakan oleh Bappeda.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi
Sulawesi Barat

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Kewenangan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
Pengadaan barang/jasa secara elektronik	Paket lelang (konstruksi, Barang dan Jasa Lainnya) sudah mencapai 100%	1. UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Kepres No. 80/2003 berikut perubahannya dan terakhir dirubah oleh Perpres No. 54 Tahun 2010	- Sosialisasi, Bimtek, penyediaan infrastruktur jaringan SPSE - Sosialisasi, Bimtek, dan Verifikasi	- Adanya komitmen pimpinan daerah tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik; - Adanya sanksi yang secara tegas mengharuskan pemanfaatan LPSE - Kebijakan Gubernur; komitmen	Kekurangan sarana dan prasarana Sosialisasi, Bimtek, penyediaan infrastruktur jaringan SPSE masih terbatas Sosialisasi, Bimtek, dan Verifikasi masih terbatas

		tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden No. 54/200 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah		OPD, Pengusaha dan LKPP	Bimtek jasa konsultansi masih terbatas Aplikasi SPSE dari LKPP
Infrastruktur <i>e-government</i>	Belum tersedianya infrastruktur jaringan WAN berbasis <i>leased line</i> VPN IP ke seluruh OPD Pemprov Sulbar (43) unit kerja	1. UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Status keberadaan jaringan belum menggunakan mekanisme penganggaran secara <i>fixed cost</i>	Besaran alokasi anggaran tidak pasti setiap tahunnya	Keterbatasan tenaga teknis dari sisi jumlah dan kualifikasi
	Terbangun dan termanfaatkannya aplikasi dan konten secara <i>online</i> (SIPKD, LPSE,)		Ketersediaan server untuk SIPKD memerlukan peningkatan kapasitas untuk pelayanan bagi seluruh SKPD	Belum seluruh SKPD memanfaatkan jaringan infrastruktur <i>online</i> untuk SIPKD	Perlunya sosialisasi lebih mendalam dalam bentuk bimtek dan pendampingan bagi masing-masing SKPD
	Terlaksananya edukasi literasi TIK bagi aparatur dan masyarakat melalui sarana dan prasarana TIK		- Ketersediaan SDM operator dan instruktur bagi edukasi literasi TIK belum memenuhi standar minimal - Belum adanya SOP dan SPM bagi penyelenggaraan bimtek	Beragamnya kualifikasi peserta bimtek dan edukasi literasi TIK aparatur dan masyarakat	Pemanfaatan hasil bimtek di SKPD bagi masyarakat belum dapat diukur secara terstandar

	Penggunaan domain www.sulbarprov.go.id tingkat provinsi baru mencapai 60%				
	Koordinasi interoperabilitas implementasi pengembangan e-government		Sudah memiliki aplikasi data tak terstruktur	Belum tersosialisasikan aplikasi pada SKPD	Keterbatasan anggaran
Diseminasi Informasi	Termanfaatkan -nya Lembaga Penyiaran Publik (RRI dan TVRI), Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas sebagai media diseminasi informasi	1. UU No. 32/2002 tentang Penyiaran; 2. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Bagian kewenangan Dinas KIPS dalam mengkoordinasikan dan memanfaatkan lembaga penyiaran	LPP mempunyai segmentasi program tersendiri	Perlu adanya koordinasi dalam menyamakan persepsi antara kewenangan Dinas KIPS dengan segmentasi program Lembaga Penyiaran
	Termanfaatkan -nya media cetak sebagai media diseminasi informasi	1. UU No. 32/2002 tentang Penyiaran; 2. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. UU No. 40/1999 Tentang Pers	Bagian kewenangan Dinas DKIPS dalam mengkoordinasikan dan memanfaatkan media cetak		
Pengelolaan Persandian	Tersedianya peralatan persandian bantuan pusat (pinjam pakai)				- Terbatasnya SDM di bidang sandi (Sandimen) - Saprasi yang belum memadai
Statistik Sektoral	Tersedianya data Sulbar dalam Angka, data PDRB yang terverifikasi oleh BPS				- Terbatas SDM yang menguasai Statistik (pengumpulan dan pengolahan data)

Kapasitas Aparatur	Jumlah pegawai 85 orang dengan kompetensi Teknis yang terbatas		Terbatasnya Kuantitas dan Kualitas Pegawai	Kebijakan Penempatan Pegawai	- Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tupoksinya. - Ketidaksesuaian kompetensi pegawai dengan tupoksi
Sarana dan Prasarana Aparatur	Belum tersedianya ruang kerja yang nyaman dan refresentatif		Prioritas Penentuan Kegiatan	Kebijakan Penganggaran	Masih terbatasnya sarana dan prasarana

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat periode 2017 - 2022 adalah “**Sulawesi Barat Maju dan Malqbiq**”. Penjabaran atas visi ini dirumuskan dalam 5 (lima) misi, yaitu: *Pertama*, Membangun sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian dan berbudaya. *Kedua*, Mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya. *Ketiga*, Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis. *Keempat*, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi. *Kelima*, Mengarustamakan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Berikut identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat yang dapat berpengaruh pada pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Tabel 3.2.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Visi: "Sulawesi Barat Maju dan Malqbiq"				
No.	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya			
	Fokus Program 5			
	Mengembangkan <i>secure optimal e-government</i>	Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan profesional - Sarana prasarana yang belum memadai /kurang - Belum optimalnya pengembangan aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepedulian pimpinan dalam pengembangan e-government. - Kebutuhan pengembangan muatan e-government
	Fokus Program 8			
	Menyelenggarakan Sistem Informasi Pemerintahan	Belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database SKPD - Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> -Kepedulian pimpinan dalam pengembangan layan informasi - Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan -Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
2	Misi 3 : Membangun dan Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis			
	Fokus Program 8			
	Mendorong Pembangunan Jaringan Komunikasi di Desa Tertinggal/terpencil/terjauh	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kesenjangan akses masyarakat terhadap informasi melalui TIK terutama di daerah-daerah terpencil 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kewenangan Dinas Kominfo, persandian dan Statisti Provinsi - Kondisi geografis 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepedulian pimpinan dalam pengembangan Jaringan komunikasi - Kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat, akurat dan terpercaya

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Salah satu yang dipertimbangkan dan menjadi rujukan dalam dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berikut hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta faktor penghambat dan pendorong dan penanganannya:

Tabel 3.3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas KIPS Sulbar	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan	Kesenjangan kemampuan pemanfaatan TIK masyarakat	Kondisi geografis	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik
2	Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan	Distribusi infrastruktur jaringan	Legalitas Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi	Pengembangan infrastruktur TIK
3	Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman	Implementasi SOP tentang tata kelola informasi internal belum terselenggara	kapasitas sarana dan prasarana komunikasi internal penunjang operasional pemerintah	Kewenangan dalam menangani TIK, dan informatika (telematika),
4	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.	Distribusi Sistem aplikasi dalam menerapkan e-government	jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK	Kemampuan Integrasi sistem pelayanan publik

3.4 **Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu 2017-2022 antara lain :

1) Implementasi e-Government

Implementasi e-Government di Sulawesi Barat berdasarkan hasil penilaian pusat masih tergolong rendah (kategori kurang). Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi e-Government semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumberdaya manusia.

2) Pembangunan Sulawesi Barat yang Berbasis Data

Pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi harus didasarkan pada data yang akurat, terbaru dan sumbernya jelas serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kebijakan pemerintah tepat sasaran. Data terbaru, valid dan reliable hanya mungkin didapatkan melalui pengintegrasian secara terpadu antara pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dengan memanfaatkan TIK.

4) Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Saat ini masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadikan tantangan besar bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksanakannya serta menjadi wajib hukumnya bagi badan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

11)Pemberdayaan dan Peran Aktif Masyarakat dalam Penyebarluasan Informasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian pesat membuat masyarakat kini tak lagi hanya sekedar konsumen informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Namun masyarakat kini adalah sumber (source), saluran (channel) dan penerima (receiver) informasi itu sendiri. Hal ini kemudian menjadikan paradigma penyampaian informasi yang top-down tidak lagi relevan untuk diterapkan. Sebab pola komunikasi sosial yang kini hadir tidak lagi bersifat singular tapi sudah berbentuk sirkuler. Dengan demikian, masyarakat harus dipandang sebagai khalayak aktif yang mampu memproduksi, menyampaikan dan mengkonsumsi informasi sekaligus. Hal ini mau tidak mau menjadikan paradigma penyampaian informasi yang bottom-up adalah yang paling relevan untuk diterapkan saat ini.

Paradigma baru komunikasi sosial ini mengandung konsekuensi logis yaitu masyarakat harus diberdayakan agar mampu menjadi agen penyebarluasan informasi tepat sasaran, produsen informasi yang sehat dan konsumen informasi yang cerdas. Disinilah peran strategis pemerintah untuk menjalankan program pemberdayaan (empowering) tersebut dengan menggali potensi masyarakat, penyediaan fasilitas komunikasi dan menghimpun serta menciptakan jejaring antar kelompok-kelompok komunikasi sosial yang tersebar di masyarakat.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD.

4.1.1 Visi

Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Dalam perumusan visi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, informasi yang dijadikan pertimbangan utama adalah: (1) visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat; (2) isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat; (3) Visi dan misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia.

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan isu-isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, maka disusunlah rumusan visi Dinas Komunikas, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai berikut:

“Terwujudnya Layanan Informasi Publik Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informatika Menuju Sulawesi Barat yang Maju dan Malaqbiq”

4.1.2 Misi

Misi adalah upaya pokok yang akan dijalankan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam rangka mewujudkan visi. Adapun misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut.

- 5) Meningkatkan penyebarluasan komunikasi dan informasi kepada masyarakat.

- 12) Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal keterbukaan informasi publik.
- 13) Optimalisasi penerapan dan pemanfaatan e-government dan kualitas layanan publik
- 14) Optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.2.1 Tujuan

Tujuan adalah gambaran tentang kondisi yang akan diubah agar visi dalam menjalankan misi dapat mewujudkan visi. Adapun tujuan pembangunan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik Provinsi Sulawesi Barat 2017 – 2022 adalah sebagai berikut.

- 15) Meningkatkan ketersediaan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), efektif dan efisien .
- 16) Meningkatkan penerapan dan pemanfaatan e-Government.
- 17) Meningkatkan keamanan informasi lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- 18) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif berbasis teknologi informasi.
- 19) Mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang akuntabel, efisien, efektif, transparan dan adil
- 20) Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam diseminasi program pembangunan dan penyediaan database profil wilayah
- 21) Meningkatkan jangkauan layanan komunikasi dan informatika sampai ke pedesaan
- 22) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur dan masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Informasi
- 23) Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan

informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik.

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah gambaran tentang hasil yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan, dimana sebuah tujuan dapat dicapai melalui lebih dari satu sasaran. Adapun sasaran pembangunan di bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik Provinsi Sulawesi Barat 2018-2022 adalah sebagai berikut.

- 19) Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik.
- 20) Meningkatnya Nilai Indeks e-Government Provinsi Sulawesi Barat
- 21) terjaminnya keamanan informasi lingkup Pemerintah Sulawesi barat melalui penyelenggaraan persandian
- 22) Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan pemerintah secara elektronik
- 23) Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik.
- 24) Terpenuhinya data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat
- 25) Meningkatnya jangkauan area jaringan komunikasi sampai ke desa terpencil/tertinggal/terjauh
- 26) Terpenuhinya SDM bidang Komunikasi dan Informasi yang kompeten
- 27) Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2018 – 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), efektif dan efisien	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik	Jumlah SKPD dan Kab/Kota yang terkoneksi jaringan komunikasi dan informatika	40	42	44	46	48
2	Meningkatkan penerapan dan pemanfaatan e-Government	Meningkatnya Nilai Indeks e-Government Provinsi Sulawesi Barat	Jumlah aplikasi berbasis web yang dikembangkan	30	34	38	42	44
3	Meningkatkan keamanan informasi lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	terjaminnya keamanan informasi lingkup Pemerintah Sulawesi barat melalui penyelenggaraan persandian	Jumlah jenis informasi yang wajib diamankan melalui penyelenggaraan persandian	10	20	30	40	50

4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif berbasis teknologi informasi	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan pemerintah secara elektronik	Meningkatnya indeks Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	3,2	4	5	5,5	6
5	Mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang akuntabel, efisien, efektif, transparan dan adil	Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	100	100	100	100	100
6	Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam diseminasi program pembangunan dan penyediaan database profil wilayah	Terpenuhinya data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat	Persentase Cakupan Pemenuhan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat	30	50	100	100	100
7	Meningkatnya jangkauan area jaringan komunikasi sampai ke desa terpencil/tertinggal/terjauh	Meningkatnya jangkauan area jaringan komunikasi sampai ke desa terpencil/tertinggal/terjauh	Rasio kecamatan yang terlayani jaringan komunikasi	38	41	44	47	50

8	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur dan masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Informasi	Terpenuhinya SDM bidang Komunikasi dan Informasi yang kompeten	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi SDM bidang Komunikasi dan Informasi	50	70	80	90	100
9	Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik	Meningkatnya diseminasi informasi, dan keterbukaan informasi publik	Indeks kepuasan masyarakat	90	95	100	100	100
10			Jumlah penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik	27	30	34	38	40

11			Persentase lembaga tertibnya pembangunan infrastruktur TIK di Provinsi Sulawesi Barat	50%	70%	90%	100%	100%
----	--	--	---	-----	-----	-----	------	------

4.3. Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 – 2022. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan. Tabel 4.2

Strategi dan Kebijakan Pembangunan di Bidang Layanan Komunikasi, Informatika, Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Visi : <i>“Terwujudnya Layanan Informasi Publik Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informatika Menuju Sulawesi Barat yang Maju dan Malaqbiq”</i>			
Misi 1 Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi kepada masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Meningkatkan ketersediaan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), efektif dan efisien .	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik	Menyusun Rencana Induk e-government (Master Plan e-Gov)	1. Mengembangkan secure optimal e-Government
Meningkatkan jangkauan layanan komunikasi dan informatika sampai ke pedesaan	Meningkatnya jangkauan area jaringan komunikasi sampai ke desa terpencil/ tertinggal/terjauh	Membangun terrestrial (FO dan microwave) atau sewa jaringan operator yang menghubungkan setiap pusat pemerintahan Kota /Kabupaten	Mendorong pembangunan jaringan komunikasi di desa tertinggal/terpencil/terjauh

Misi 2			
Mendorong Partisipasi masyarakat dalam mengawal keterbukaan informasi publik			
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif berbasis teknologi informasi	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan pemerintah secara elektronik		
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur dan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi	Terpenuhinya sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi yang kompeten	Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas	Peningkatan dan pengembangan kualitas aparatur pada setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean Government and good government
Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik.	Meningkatnya diseminasi informasi dan keterbukaan informasi publik	Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi	Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik
Misi 3			
Optimalisasi penerapan dan pemanfaatan e-government dan kualitas layanan publik			
Meningkatkan penerapan dan pemanfaatan E-Government	Meningkatnya sasaran Nilai Indeks E-Government	Meningkatkan layanan pemerintah berbasis TIK	Pengembangan aplikasi dan pemenuhan jaringan e-Govermen
Meningkatkan keamanan informasi lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Terjaminnya keamanan informasi lingkup Pemerintah Sulawesi Barat melalui penyelenggaraan persandian	menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi dan menetapkan pola komunikasi sandi antar organisasi perangkat daerah serta kabupaten	Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi
Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam diseminasi program pembangunan dan penyediaan data base profil wilayah	Terpenuhinya data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat	Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi	Peningkatan kemudahan akses publik terhadap data informasi pembangunan daerah

Misi 4

Optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Mewujudkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang akutabel, efisien, efektif, transparan dan adil	Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	Menyiapkan seluruh sumber daya yang dibutuhkan LPSE	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan aplikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.2. Pningkatan kompetensi pengelola LPSE
---	---	---	--

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Provinsi Sulawesi Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja dan Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang/ Bagian Penanggungjawab	Lokasi					
									2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
									target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		Tercapainya Pelayanan Adm Perkantoran	2	10	2	10	01	Program Administrasi Perkantoran	Optimalnya layanan perkantoran	100%	100%	796,550,000	100%	1,096,000,000	100%	1,291,000,000	100%	1,542,000,000	100%	1,483,000,000	100%	4,831,350,000		Sulbar	
							01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	% Surat Dinas yang terkirim	100%	100%	24,200,000	100%	26,000,000	100%	30,000,000	100%	40,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000			
								02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air, dan Listrik	12 bln	12 bln	139,000,000	12 bln	90,000,000	12 bln	95,000,000	12 bln	100,000,000	12 bln	110,000,000	100%	110,000,000		
								08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bln	12 bh	68,000,000	12 bln	80,000,000	12 bln	90,000,000	12 bln	100,000,000	12 bln	110,000,000	100%	110,000,000		
								10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		100%	75,000,000	100%	80,000,000	100%	90,000,000	100%	100,000,000	100%	110,000,000	100%	110,000,000		
								11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12 bln	30,000,000	12 bln	35,000,000	12 bln	40,000,000	100%	45,000,000	12 bln	50,000,000	100%	50,000,000		
								13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		41 unit	136,350,000	60 unit	350,000,000	60 unit	400,000,000	80 unit	500,000,000	45 unit	350,000,000	286 unit	1,736,350,000		
								14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia		46 bh	20,000,000	20 bh	25,000,000	25 bh	30,000,000	30 bh	35,000,000	10 bh	25,000,000	131 bh	135,000,000		
								17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makan minum tamu dan rapat-rapat internal		12 bln	54,000,000	12 bln	60,000,000	12 bln	66,000,000	12 bln	72,000,000	12 bln	78,000,000	60 bln	330,000,000		
								18	Rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat rapat konsultasi ke luar daerah		100%	150,000,000	12 bln	200,000,000	12 bln	250,000,000	12 bln	300,000,000	12 bln	350,000,000	60 bln	1,250,000,000		
								20	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	terlaksananya rapat rapat konsultasi dalam daerah		100%	100,000,000	12 bln	150,000,000	12 bln	200,000,000	12 bln	250,000,000	12 bln	250,000,000	60 bln	950,000,000		
		tersedianya sarana & prasarana Aparatur yang memadai	2	10	2	10	02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya kinerja layanan oleh Aparatur melalui peningkatan sarana dan prasarana yang cukup dan		100%	374,700,000	100%	570,000,000	100%	705,000,000	100%	815,000,000	100%	925,000,000	100%	3,389,700,000			
								07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rasio ketersediaan perlengkapan gedung kantor		20%	69,700,000	30%	100,000,000	50%	150,000,000	70%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	769,700,000		

								11	Pengadaan Komputer/Jaringan komputer dan Kelengkapannya	Jumlah Komputer / Laptop dan Printer yang tersedia		6 unit	75,000,000	10 unit	200,000,000	12 unit	250,000,000	15 unit	300,000,000	20 unit	350,000,000	63 unit	1,175,000,000				
								22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor dalam kondisi tetap layak pakai		1 Gedung	150,000,000	1 Gedung	175,000,000	1 Gedung	200,000,000	1 Gedung	200,000,000	1 Gedung	200,000,000	1 gedung	200,000,000	1 gedung	925,000,000		
								24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi layak pakai		18 unit	50,000,000	25 unit	55,000,000	25 unit	60,000,000	30 unit	65,000,000	30 unit	70,000,000	30 unit	300,000,000				
								28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase peralatan gedung kantor dalam kondisi layak pakai		100%	30,000,000	100%	40,000,000	100%	45,000,000	100%	50,000,000	100%	55,000,000	100%	220,000,000				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang/ Bagian Penanggungjawab	Lokasi		
							2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
			21021003	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			100%	206,200,000	100%	244,700,000	100%	260,000,000	100%	310,000,000	100%	285,000,000	100%	1,305,900,000		
				Pengadaan Mesin Absensi	Jumlah mesin absensi yang tersedia		1 unit	11,500,000	1 unit	25,000,000			1 unit	25,000,000			3 unit	61,500,000		
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disiapkan		236 psg	75,000,000	236 psg	100,000,000	236 psg	125,000,000	236 psg	150,000,000	236 psg	150,000,000	1.180 psg	600,000,000		
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian olahraga, dan kelengkapannya yang tersedia		133 psg	119,700,000	133 psg	119,700,000	150 psg	135,000,000	150 psg	135,000,000	150 psg	135,000,000	716 psg	644,400,000		
			21021005	Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meingkatnya Kualitas SDM Aparatur			650,000,000		830,000,000		1,050,000,000		900,000,000		1,350,000,000		4,480,000,000		
				13 Sosialisasi Regulasi Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi		75 org	250,000,000	75 org	300,000,000	80 org	350,000,000	90 org	400,000,000	100 org	450,000,000	420 org	1,750,000,000		
				14 Pelayanan Penyelesaian Sengketa Informasi	Persentase Sengketa Informasi yang terselesaikan		70%	100,000,000	80%	150,000,000	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	300,000,000	100%	1,000,000,000		
				Pendidikan dan Pelatihan Teknik Dasar Bidang Kominfo dan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknik Dasar		5 org	100,000,000	7 org	140,000,000	10 org	200,000,000	12 org	250,000,000	15 org	300,000,000	49 org	990,000,000		
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklatpim III dan		4 org	100,000,000	4 org	100,000,000	4 org	100,000,000					12 org	300,000,000		
				Pendidikan dan Pelatihan teknis Keuangan dan Kinerja Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek Keuangan dan Kinerja Aparatur		5 org	100,000,000	7 org	140,000,000	10 org	200,000,000			15 org	300,000,000	37 org	440,000,000		
			21021006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				578,100,000		580,000,000		655,000,000		707,500,000		920,000,000		3,440,600,000		
				01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja APBD	Jumlah Dokumen		3	10,100,000	3	12,000,000	3	15,000,000	3	17,500,000	3	20,000,000	15	74,600,000		
				05 Penyusunan Renstra/ Renja / LAKIP dan LPPD	Jumlah Dokumen		4	40,000,000	4	40,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	5	150,000,000	21	330,000,000		
				06 Penyusunan RKA/ DPA-SKPD	Jumlah Dokumen		2	14,000,000	2	14,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	25,000,000	10	93,000,000		
				09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi dan Laporan Kegiatan		12	200,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	12	250,000,000	12	300,000,000	60	1,150,000,000		
				16 Penyusunan RKAP/ DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen		2	14,000,000	2	14,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	25,000,000	10	93,000,000		
				Rapat Koordinasi/Evaluasi Kebijakan Program dan	Terlaksananya Rapat Forum Bidang kominfo		1	300,000,000	1	300,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	1	400,000,000	5	1,700,000,000		
Meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan	Meningkatnya informasi dan keterbukaan informasi publik		21021015	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan media massa	Jumlah Penyebaran informasi melalui media elektronik dan non elektronik		27	3,400,000,000	30	4,550,000,000	34	5,700,000,000	38	6,850,000,000	40	8,000,000,000	40	26,900,000,000		Sulbar
				Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika	Terbinanya Jaringan Komunikasi dan Informatika			300,000,000		350,000,000		400,000,000		450,000,000		500,000,000		400,000,000		Sulbar
				16 Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Website Pemrov.	terpeliharanya jaringan website pemprov. Sulbar		1 Jaringan	1,000,000,000	1 Jaringan	1,500,000,000	1 Jaringan	2,000,000,000	1 Jaringan	2,500,000,000	1 Jaringan	3,000,000,000	1 Jaringan	10,000,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Bidang/ Bagian Penanggungjawab	Lokasi		
							2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
keterbukaan informasi				Penyebarluasan Informasi Melalui Rubrik Khusus Melalui Media	Jumlah Informasi yang disebarluaskan melalui media		25 media	500,000,000	25 media	550,000,000	25 media	600,000,000	25 media	650,000,000	25 media	700,000,000	125 media	3,000,000,000		
				Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Unit Pelaksana Teknis Komisi Informasi	Terselenggaranya Kegiatan rutin JPTD Layanan Informasi		12 bln	1,500,000,000	12 bln	2,000,000,000	12 bln	2,500,000,000	12 bln	3,000,000,000	12 bln	3,500,000,000	60 bln	12,500,000,000		Sulbar
				Penyebarluasan Informasi dalam bentuk Advetorial	Jumlah exemplar		100 exp	100,000,000	100 exp	150,000,000	100 exp	200,000,000	100 exp	250,000,000	100 exp	300,000,000	500 exp	1,000,000,000		Sulbar
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur dan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi	Terpenuhinya SDM bidang komunikasi dan informasi yang kompeten		2 10 2 10 17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Prosentase cakupan pemenuhan kompetensi SDM bidang komunikasi dan		50%	210,000,000	70%	420,000,000	80%	420,000,000	90%	630,000,000	100%	630,000,000	100%	2,310,000,000		Sulbar
				Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah Peserta		30 org	105,000,000	60 org	210,000,000	60 org	210,000,000	90 org	315,000,000	90 org	315,000,000	360 org	#####		
				Bimbingan Teknis komunikasi masyarakat Bagi Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah Peserta		30 org	105,000,000	60 org	210,000,000	60 org	210,000,000	90 org	315,000,000	90 org	315,000,000	360 org	#####		
Meningkatkan pengetahuan kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi	Meningkatkan informasi dan keterbukaan informasi publik		2 10 2 10 18	Program Kerja sama Informasi dan Media Massa	Indeks kepuasan masyarakat		90%	1,670,000,000	95%	1,700,000,000	100%	1,770,000,000	100%	1,850,000,000	100%	1,900,000,000	100%	8,890,000,000		
				04 Pekan Informasi Nasional (PIN)	ikut sertanya Sulbar dalam ajang informasi tingkat nasional		1 keg	220,000,000	1 keg	250,000,000	1 keg	270,000,000	1 keg	300,000,000	1 keg	350,000,000	5 keg	1,390,000,000		
				06 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya UPT Radio Banua Malaqbi Sulawesi Barat	Jumlah UPTD		1 UPTD	450,000,000	1 UPTD	450,000,000	1 UPTD	500,000,000	1 UPTD	550,000,000	1 UPTD	550,000,000	1 UPTD	2,500,000,000		
				Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya UPT Komisi Penyiaran Indonesia Daerah			1 UPTD	1,000,000,000	1 UPTD	1,000,000,000	1 UPTD	1,000,000,000	1 UPTD	1,000,000,000	1 UPTD	1,000,000,000	1 UPTD	5,000,000,000		
Tersedianya Teknologi Informasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) efektif dan efisien	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik		2 10 2 10 19	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah SKPD dan Kab/Kota yang terkoneksi jaringan komunikasi dan informatika		40	3,895,000,000	42	3,785,000,000	44	4,595,000,000	46	4,720,000,000	48	4,875,000,000	48	21,565,000,000		
				07 Sosialisasi Pemanfaatan Layanan E-Government dan Smart City	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi		50 org	175,000,000	70 org	300,000,000	100 org	350,000,000	120 org	400,000,000	150 org	450,000,000	490 org	1,675,000,000		
				12 Pemeliharaan/Maintenance Jaringan Fiber Optik (FO)	Jumlah titik koneksi jaringan dalam kondisi baik		43	780,000,000	43	450,000,000	43	500,000,000	43	550,000,000	43	600,000,000	43	2,880,000,000		
				13 Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi	Jumlah daerah evaluasi		6 Kab.	55,000,000	6 Kab.	60,000,000	6 Kab.	100,000,000	6 Kab.	120,000,000	6 Kab.	150,000,000	6 Kab.	485,000,000		
				14 Sosialisasi perlindungan informasi milik daerah	Jumlah peserta		42 org	85,000,000	42 org	100,000,000	42 org	120,000,000								
				Pengembangan Karkompusda dan Karkomda Prov. Sulbar	Terjalannya komunikasi antara karkompusda dengan karkomda Prov. Sulbar		7 lbg	250,000,000	7 lbg	300,000,000	7 lbg	325,000,000	7 lbg	350,000,000	7 lbg	375,000,000	7 lbg	1,600,000,000		

Tujuan	Sasaran	Sub Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja dan Kegiatan (output)	Data Capaian per Tahun Awal Perencanaan	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Bidang/ Bagian Penanggungjawab	Lokasi
							target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
					Koordinasi/Konsultasi Penetapan Regulasi dan Kebijakan Implementasi Tata Kelola E-Governmen	Jumlah koordinasi dan konsultasi tentang peraturan tentang E-Government	10 kali	150,000,000	10 kali	175,000,000	10 kali	200,000,000	15 kali	300,000,000	15 kali	300,000,000	60 kali	1,125,000,000		
					Pengadaan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)	Jumlah kendaraan MPLIK yang tersedia	2 unit	1,200,000,000	2 unit	1,200,000,000	2 unit	1,200,000,000	2 unit	1,200,000,000	2 unit	1,200,000,000	10 unit	6,000,000,000		
					Pengadaan Pusat Layanan Internet (PLIK) Sentra Produktif	Jumlah PLIK yang tersedia	4 titik	1,200,000,000	4 titik	1,200,000,000	6 titik	1,800,000,000	6 titik	1,800,000,000	6 titik	1,800,000,000	26 titik	7,800,000,000		
			2 10 2 10 20		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah															
				06	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya UPT Layanan pengadaan secara elektronik	Terpenuhinya pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Unit Pelaksana Teknis Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)	12 bln	1,000,000,000	12 bln	1,200,000,000	12 bln	1,300,000,000	12 bln	1,400,000,000	12 bln	1,500,000,000	60 bln	6,400,000,000		
			2 10 2 10 24		Program Pelayanan Aplikasi pemerintahan dan Layanan publik															
				02	Penyusunan Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/E-Government)	Jumlah Dokumen Masterplan	1	450,000,000									1	450,000,000		Sulbar
					Sosialisasi/Bimbingan Teknis Aplikasi Elektronik	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi	30 org	125,000,000	40 org	200,000,000	40 org	220,000,000	40 org	250,000,000	40 org	250,000,000	190 org	1,045,000,000		
					Pengelolaan Konten Lintas Sektoral	Terselenggaranya Layanan Konte Lintas Sektoral	43 titik	175,000,000	43 titik	200,000,000	43 titik	250,000,000	43 titik	250,000,000	43 titik	250,000,000	43 titik	1,125,000,000		
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Smart City	Jumlah Layanan Smart City	1 titik	450,000,000	2 titik	800,000,000	2 titik	900,000,000	3 titik	1,000,000,000	4 titik	1,500,000,000	12 titik	4,650,000,000		
					Pembangunan Gedung Data Center/Server	Tersedianya Gedung Data Center/Server			1 gedung	1,000,000,000							1 gedung	1,000,000,000		

BAB V

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat Periode 2017 –2022 disajikan pada tabel 5.1

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Persentase Cakupan Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	30%	50%	70%	90%	100%	100%	100%
2	Jumlah OPD Provinsi dan Kab./Kota yang terkoneksi jaringan telekomunikasi	38	40	42	44	46	48	48
3	Jumlah aplikasi berbasis web yang dikembangkan	5	30	35	40	42	42	42
4	Persentase Lembaga Tertibnya Pembangunan Infrastruktur TIK di Provinsi Sulawesi Barat	40%	50%	70%	90%	100%	100%	100%
5	Jumlah jenis informasi yang wajib diamankan melalui penyelenggaraan persandian	2	10	20	30	40	50	50
6	Meningkatnya indeks Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	3.2	4	5	5.5	6	7	7

7	Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Cakupan Pemenuhan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat	10%	30%	50%	75%	100%	100%	100%
9	Rasio Kecamatan yang terlayani Jaringan Komunikasi	36	38	41	44	47	50	50
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	60%	70%	75%	80%	90%	100%	100%
11	Jumlah Penyebaran Informasi Melalui Media Elektronik dan Non Elektronik	23	27	30	34	38	40	40